

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan ekonomi nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional. Selain itu, perbankan memiliki peranan yang strategis serta memiliki peranan yang penting dalam perekonomian negara, karena perbankan adalah suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berazaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat.

Peran serta perbankan di dalam pembangunan ekonomi suatu negara sangat vital, seperti sebuah jantung dalam tubuh manusia. Maksudnya adalah perbankan dapat mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi, sehingga bank

yang sehat akan memperkuat kegiatan ekonomi suatu negara. Begitu juga sebaliknya, kegiatan ekonomi yang tidak sehat, akan mempengaruhi keterpurukan dunia perbankan dan perekonomian nasional.

Kegiatan perbankan juga mengikuti kemajuan berbagai macam ekonomi, baik pasar domestik sampai pasar global, sehingga fungsi perbankan tersebut semakin bertambah. Perkembangan ini tentu saja mempunyai kemungkinan bertambahnya risiko yang mungkin akan mempengaruhi kesehatan perbankan. Dahulu perbankan bisa tumbuh dan berkembang berdasar kebiasaan praktik yang diakui oleh masyarakat sebagai norma hukum tidak tertulis, maka dengan semakin kompleks risiko yang dihadapi, praktik perbankan harus diatur oleh suatu sistem perundangan yang modern.

Dari ketentuan ini jelaslah bahwa lembaga perbankan mempunyai peranan penting dan strategis tidak saja dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, tetapi juga diarahkan agar mampu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Ini berarti bahwa lembaga perbankan haruslah mampu berperan sebagai agen pembangunan (*Agent of Development*) dalam upaya mencapai tujuan nasional itu, dan tidak menjadi beban dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.<sup>1</sup>

Bank sebagai perusahaan pemberian fasilitas kredit telah membantu masyarakat dalam menyediakan modal usaha sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 Undang - Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang

---

<sup>1</sup> Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, hal 40.

Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang menetapkan pengertian bank sebagai berikut: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka menghidupkan taraf hidup orang banyak.”<sup>2</sup>

Berdasarkan rumusan pengertian bank sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan Undang - Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan tersebut, dapat diketahui bahwa kredit adalah salah satu bentuk kegiatan usaha bank dalam rangka menyalurkan dananya kepada masyarakat. Kredit terkait dengan pelaksanaan fungsi bank sebagai suatu badan usaha.

Fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana nasabah. Pemberian kredit merupakan salah satu wujud kegiatan usaha dari bank yang berkaitan dengan penyaluran dana kepada masyarakat. Kebijakan penyelenggaraan kredit bagi rakyat golongan usaha kecil dan menengah mempunyai berbagai macam kepentingan diantaranya adalah kepentingan politik, ekonomi dan rasa keadilan dari banyak pihak yang terlibat di dalamnya yakni perbankan, rakyat (pengusaha kecil, menengah) dan penyelenggara negara. Peranan ekonomi kerakyatan dalam perekonomian nasional, tidak perlu kita diragukan lagi. Pengalaman ketika krisis ekonomi membuktikan bahwa kegiatan ekonomi rakyat (dalam bentuk usaha mikro,

---

<sup>2</sup> Undang - Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

kecil, menengah dan koperasi) lebih bisa bertahan. Bahkan, banyak stakeholder yang yakin bahwa ekonomi rakyatlah yang menyelamatkan perekonomian nasional dari krisis ekonomi yang panjang.

Dengan pemberian kredit oleh bank pada masyarakat, khususnya usaha kecil dan menengah maka, dapat mewujudkan pembangunan ekonomi negara yang mengacu pada pemerataan pembangunan nasional, pertumbuhan perekonomian dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat. Kredit sangat dibutuhkan masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha guna memenuhi kebutuhan konsumsinya maupun untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Kegiatan yang menyangkut produksi misalnya, masyarakat mengajukan kredit pada bank untuk meningkatkan kegiatan usahanya, baik berwujud modal kerja, ataupun investasi pembelian asset perusahaan, sedangkan kegiatan yang bersifat konsumtif misalnya, masyarakat mengajukan kredit pada bank untuk membeli rumah dan atau kebutuhan yang lain.

Pelaksanaan dari kredit usaha rakyat (KUR) yang ditujukan kepada masyarakat (pelaku ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah) atau biasa disebut UMKM, serta koperasi, merupakan salah satu bentuk fasilitas kredit yang memudahkan nasabah, khususnya yang menjadi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi, yang telah diterapkan di beberapa bank di Indonesia, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI),

Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara dan Bank Bukopin.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha-usaha yang dijalankan oleh golongan-golongan ekonomi menengah kebawah. Maka dari itu, UMKM memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi, karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil. Hal ini membuat UMKM tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal sehingga pengembangan pada sector UMKM dapat menunjang diversifikasi ekonomi dan percepatan perubahan struktural yang merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan.<sup>3</sup>

KUR adalah tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Perusahaan Penjamin (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbankan (Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri). KUR ini didukung oleh

---

<sup>3</sup> Peran dan Permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dalam <http://siap-bos.blogspot.com/2009/05/peran-dan-permasalahan-usaha-mikro.html> Diunduh pada tanggal 4 November 2011 pukul. 23.37

Kementerian Negara BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Bank Indonesia.

Kredit Usaha Rakyat Tanpa Jaminan diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007 dengan Wujud Aplikasi Kebijakan Pemerintah melalui percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tertuang dalam Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 dan sebagai Landasan Operasionalnya adalah Instruksi Presiden No.5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR ini, berbagai kemudahan bagi UMKM pun ditawarkan oleh pemerintah. Berbagai macam di antaranya adalah penyelesaian kredit bermasalah UMKM dan pemberian kredit UMKM hingga Rp 500 juta. Inpres tersebut didukung oleh Peraturan Menkeu No 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan KUR. Jaminan KUR sebesar 70 persen dapat ditutup oleh pemerintah melalui PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perusahaan Sarana Pengembangan Usaha dan 30 persen ditutup Bank Pelaksana.

Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), merupakan perusahaan yang bergerak dibidang asuransi yang mendapat pengakuan resmi dari pemerintah. PT Askrindo dituntut memberikan jaminan kepada perbankan maupun non perbankan atas kredit yang diberikan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam hal ini, PT.Askrindo berfungsi sebagai pemberi jaminan atau ganti rugi

atas kemacetan kredit yang disalurkan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menyusunnya menjadi sebuah skripsi dengan judul :

**“ TINJAUAN YURIDIS MEKANISME KREDIT USAHA RAKYAT  
OLEH BANK BRI CABANG SURAKARTA UNIT LAWEYAN“**

## **B. PEMBATASAN MASALAH**

Untuk mempermudah masalah yang akan dibahas dan mempermudah dalam pengumpulan data, maka perlu adanya pembatasan masalah. Pembatasan ini setidaknya memberikan gambaran kemana arah penelitian dan memudahkan penulis menganalisis permasalahan yang diteliti.

Adapun pembatasan masalah mengenai mekanisme pemberian Kredit Usaha Rakyat oleh bank, permasalahan hukum yang timbul dari Kredit Usaha Rakyat dan hubungan kerjasama antara Bank Rakyat Indonesia Unit Laweyan dengan P.T Askrindo cabang Semarang.

## **C. RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang akan ditelitinya, sehingga dapat mencapai tujuan yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan

yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank?
2. Permasalahan hukum apa yang timbul dari mekanisme pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) ?
3. Bagaimana hubungan kerjasama pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) antara Bank Rakyat Indonesia cabang Surakarta unit Laweyan dengan PT Askrindo cabang Semarang selaku lembaga penjamin?

#### **D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemberian kredit usaha rakyat (KUR) oleh bank.
- b. Untuk mengetahui permasalahan hukum yang timbul dari mekanisme pemberian kredit usaha rakyat (KUR).
- c. Untuk mengetahui bagaimana hubungan kerjasama pemberian kredit usaha rakyat antara bank dengan PT Askrindo selaku lembaga penjamin.

##### **2. Manfaat Penelitian**



Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat terealisasi. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai mekanisme pemberian kredit usaha rakyat (KUR) beserta permasalahan yang ditimbulkannya.
- b. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya.
- c. Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literature atau bahan informasi ilmiah.

#### 2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktisnya yaitu bahwa dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan semua pihak yang berkepentingan pada khususnya mengenai mekanisme pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) beserta permasalahan hukum yang timbulkannya.

### **E. METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian merupakan cara untuk memperoleh data secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan dari

penelitian dapat tercapai. Metodologi penelitian juga merupakan cara atau langkah sebagai pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang suatu gejala atau merupakan suatu cara untuk memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Suatu laporan penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode penelitian yang tepat. Penelitian dimulai ketika seorang berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapinya secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu yang bersifat ilmiah. Artinya bahwa metode atau teknik yang digunakan tersebut bertujuan untuk satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh faktor-faktor tersebut.<sup>4</sup>

Metode merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian, beberapa hal yang menjadi bagian dari metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Pendekatan**

Pendekatan dalam penelitian ini termasuk pendekatan hukum yuridis empiris. Pendekatan Hukum Sosiologis atau empiris adalah metode yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, hal 12.

dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.<sup>5</sup>

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian diskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk melukiskan mekanisme pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).

## **3. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Surakarta unit Laweyan dan PT. Askrindo cabang Semarang. Pengambilan lokasi tersebut dikarenakan Bank Rakyat Indonesia cabang Surakarta merupakan salah satu bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan lokasi strategis yang bersinggungan dengan banyak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta bekerjasama dengan PT. Askrindo dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut.

## **4. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah :

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data atau fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji.2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*.Jakarta:Rajawali Pers, hal 14.

dilapangan yaitu berupa wawancara dengan pihak yang berkompeten pada Bank Rakyat Indonesia dan PT. Askrindo cabang Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau fakta atau keterangan yang digunakan oleh seseorang secara tidak langsung dari lapangan, antara lain mencakup lembar permohonan kredit usaha rakyat, literature, catatan, karya ilmiah, laporan penelitian, dan sumber lain yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti antara lain :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah keadaan dimana peneliti mengamati langsung terhadap gejala-gejala objek yang diselidiki baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi yang diadakan.<sup>6</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses dimana orang saling bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (*opinion*) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.<sup>7</sup> Dengan kata lain, wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh

---

<sup>6</sup> Winarno Surtachmad, 1987, *Dasar dan Tehnik Research*, Bandung: Tarsito, Hal 162.

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 45.

pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari orang yang diwawancarai (*interviewee*).<sup>8</sup>

c. Studi Kepustakaan (*library research*)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji kepustakaan dengan tujuan memperoleh data yang diperlukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, mempelajari, dan mengutip data-data yang diperoleh dari buku yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis diskriptif kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto “ *analisis data kualitatif adalah merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang di nyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, dan perilaku nyata* “. <sup>9</sup> Metode analisis kualitatif dalam penelitian ini mengikuti pola deduksi untuuk menjawab permasalahan dalam objek penelitian. Data yang sudah diperoleh disusun dengan bentuk penyusunan data, kemudian dilakukan reduksi atau pengelolaan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan.

---

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, Jakarta: Rineka Cipta, Hal 132.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Hal 31

## **F. SISTEMATIKA SKRIPSI**

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan skripsi yang sesuai dengan aturan dalam penelitian, maka penulis menjabarkannya dalam bentuk sistematika penelitian yang terdiri dari 4 (empat) bagian yang tersusun dalam bab-bab, dimana satu sama lain saling berkaitan, dan di setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

### **BAB I            PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Metodologi Penelitian
- F. Sistematika Penelitian

### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Umum Tentang Bank
  - 1. Pengertian Bank
  - 2. Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank
  - 3. Jenis-jenis Bank
  - 4. Sumber Hukum Perbankan
  - 5. Prinsip Operasional Perbankan

6. Kegiatan Bank menurut UU No 10 Tahun 1998  
Tentang Perbankan

#### B. Tinjauan Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit
2. Jenis-jenis Kredit
3. Sistem Pemberian Kredit
4. Prinsip Pemberian Kredit
5. Perjanjian Kredit
6. Fungsi dan Tujuan Kredit

#### C. Tinjauan Tentang Kredit Usaha Rakyat

1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat
2. Landasan Hukum Kredit Usaha Rakyat
3. Tujuan Kredit Usaha Rakyat

#### D. Tinjauan Tentang Asuransi Kredit

1. Pengertian asuransi kredit
2. Macam-macam asuransi kredit
3. Tujuan asuransi kredit
4. Penutupan asuransi

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)  
oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Surakarta.

2. Permasalahan hukum yang timbul dari mekanisme pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).
3. Hubungan kerjasama pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) antara Bank Rakyat Indonesia cabang Surakarta dengan PT Askrindo cabang Semarang selaku lembaga penjamin.

#### BAB IV      PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

#### DAFTAR PUSTAKA